

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang secara potensial memiliki pasar yang besar jika dilihat dari sisi sumber daya manusianya, terutama ketersediaan jumlah tenaga kerja yang seharusnya bisa menjadi penggerak perekonomian. Namun, Indonesia memiliki sebagaimana masalah berbagai pada masalah negara berkembang lainnya, khususnya bidang ketenagakerjaan, seperti perkembangan angkatan kerja yang pesat namun tidak diikuti lapangan pekerjaan yang cukup. Selain itu, banyak angkatan kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja meskipun permintaannya sangat tinggi, sehingga meningkatkan pengangguran. Sukirno (2006), menyatakan bahwa pembangunan perekonomian memerlukan dua faktor penting yaitu modal dan tenaga ahli. Tersedianya modal saja tidak cukup untuk memodernkan suatu perekonomian, tetapi pelaksana modern tersebut juga harus ada. Dengan kata lain, diperlukan golongan golongan tenaga kerja yang terdidik.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Indonesia memiliki angka kelahiran yang tinggi sehingga hal tersebut menyebabkan penduduk Indonesia akan semakin bertambah setiap tahunnya. Setiap negara mempunyai masalah makro yang hampir sama, yaitu mengenai kemiskinan, inflasi, utang luar negeri, dan pengangguran. Seluruh negara memiliki permasalahan utama ekonomi makro tersebut yang harus

diatasi oleh pemerintahan negara (Fair, 2002). Oleh karena itu setiap negara ingin terlepas dari permasalahan ekonomi makro agar penduduk yang berada dalam negara tersebut dapat merasakan kesejahteraan ekonomi. Maka dari itu pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang penting dalam mensejahterakan penduduk.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 2003). Pembangunan ekonomi sendiri mencakup banyak hal salah satunya adalah mengenai sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia di Indonesia sangat banyak akan tetapi tidak semua sumber daya manusia memiliki kualitas dan kemampuan yang sama. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang pertumbuhan angkatan kerjanya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja, di mana potensi Indonesia Memiliki kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan dan di sisi lain dihadapkan dengan berbagai hambatan, terutama di bidang ketenagakerjaan seperti pengangguran. Salah satunya adalah pengangguran berpendidikan. Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Pada beberapa tahun lalu, masalah pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri.

Seiring dengan berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja yang selanjutnya semakin dicitkan oleh faktor-faktor eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya masalah utang luar negeri, dan kebijakan lainnya yang pada gilirannya telah mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah, dan penyediaan lapangan kerja akibat dari tidak seimbangannya antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja terjadilah pengangguran (Todaro, 2000).

Dalam wilayah suatu negara pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa besar kegiatan ekonominya dalam meningkatkan pendapatan serta memberi dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Timbul berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi perekonomian negara berkembang. Satu dari permasalahan tersebut yaitu masalah dalam bidang ketenagakerjaan. Di Indonesia tingginya tingkat pengangguran menjadi masalah besar yang mendasar dalam bidang ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia diakibatkan oleh pertumbuhan tenaga kerja yang selalu meningkat akan tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja. Pengangguran digambarkan sebagai orang-orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, bekerja hanya kurang dari dua hari dalam seminggu, atau seseorang yang mencari pekerjaan yang lebih layak untuk dirinya. Pengangguran menjadi masalah yang dapat

mengganggu ekonomi suatu daerah karena hal ini akan menimbulkan masalah kemiskinan dan permasalahan sosial (Basuki, 2014).

Pengangguran merupakan satu hal yang tidak asing bagi bangsa Indonesia, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia memang selalu menjadi polemik yang tidak pernah ada habisnya. Selain karena sumber daya manusia yang kurang berkualitas, kurangnya jumlah pekerjaan padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja, sehingga mendorong tingginya tingkat pengangguran di Indonesia (Putra, 2012).

Secara umum, pengangguran disebabkan oleh tidak sempurnanya pasar tenaga kerja. Pertambahan tenaga kerja baru tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan beberapa angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Tantangan berat dalam bidang ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini adalah tingkat pengangguran yang masih besar jumlahnya, lapangan pekerjaan belum mencukupi, dan pertambahan jumlah angkatan kerja yang melebihi pertambahan jumlah lapangan kerja. Tingginya tingkat pengangguran adalah suatu masalah yang mendasar bagi ketenagakerjaan di suatu negara berkembang. Hal tersebut bisa terjadi karena pertambahan tingginya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan tersedianya lahan pekerjaan, akibatnya jumlah lapangan kerja yang ada tidak mampu menyerap tenaga kerja di negara berkembang (Indayani & Har ton, 2020).

Menurut Mankiw (2003) pengangguran terdidik adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja namun memiliki pendidikan

SMA ke atas. Masalah pengangguran akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, serta menurunnya produktivitas masyarakat. Selain itu, meningkatnya pengangguran dapat mempengaruhi kondisi sosial dan politik yang serius, seperti meningkatnya kriminalitas dan gangguan terhadap stabilitas politik negara (Karmeli & Rohana, 2019). Salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan produksi barang dan jasa di wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB atau PDRB atas dasar harga konstan (BPS, 2021). Mankiw (2007) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan negatif pada pengangguran seperti yang di jelaskan pada Hukum Okun. Menurut Hukum Okun itu sendiri bahwa pengangguran yang mempunyai output mempunyai pengaruh empiris. Output itu dihasilkan pada berapa banyak para pekerja yang digunakan. Semakin banyaknya jumlah para pekerja maka output yang dihasilkan pun cenderung besar, dalam kondisi seperti itu dapat menambah permintaan tenaga kerja dan bisa juga untuk membuat lapangan pekerjaan baru.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengangguran terdidik adalah investasi. Investasi dapat diartikan me masukan uang atau dana dan mengharapkan mendapatkan keuntungan tertentu lewat uang atau dana yang di masukan tersebut (Umam, 2018). Hubungan antara investasi dengan pengangguran yakni investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya, semakin besar kapasitas produksi

akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula, dengan asumsi “*full employment*”. Hal ini dikarenakan investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, di mana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja. Sehingga, perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat sehingga menurunkan tingkat pengangguran (Dewi, 2019). Pengeluaran investasi berpeluang untuk menumbuhkan kesempatan kerja, bila meningkatnya permintaan atas barang dan jasa, maka akan menimbulkan peningkatan pada permintaan tenaga kerja yang berakibat pada penurunan tingkat pengangguran (Kurniawan, 2014).

Faktor lain yang mempengaruhi pengangguran terdidik adalah inflasi. Ketika terjadi inflasi maka daya beli masyarakat akan menurun yang akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dengan keadaan seperti ini, maka perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga kerja yang berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja sehingga pengangguran terdidik akan semakin meningkat (Rizka, 2015). Menurut Sukirno (2010) bahwa inflasi itu sendiri akan mengakibatkan tingkat suku bunga pinjaman tinggi. Maka dari itu, dengan tingginya tingkat suku bunga dapat mengakibatkan pengurangan investasi untuk mengembangkan sektor yang produktif. Hal tersebut dapat mendorong jumlah pengangguran terdidik yang jumlahnya tinggi karena kesempatan kerja yang rendah.

Selain pertumbuhan ekonomi, investasi dan inflasi, pengangguran terdidik juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk. Penduduk

diartikan mereka yang menetap pada suatu wilayah atau di suatu daerah tersebut selama enam bulan atau sekurang-kurangnya dari enam bulan dan bermaksud menetap di wilayah atau tempat tersebut (BPS, 2021). Menurut Subandi (2011) pertumbuhan penduduk diartikan sebagai berubahnya jumlah penduduk di wilayah tertentu pada waktu tertentu di bandingkan dengan waktu sebelumnya. Semakin banyak pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut maka semakin banyaknya masyarakat yang menganggur atau bahkan yang tidak mempunyai pekerjaan yang diakibatkan karena lapangan kerja yang tersedia tidak mampu untuk menampung penduduk yang setiap tahunnya meningkat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan sosio-ekonomi yang unik. Meskipun kaya akan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam, NTT masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh NTT adalah tingkat pengangguran, terutama di kalangan lulusan yang terdidik. Pengangguran terdidik menjadi perhatian serius karena tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghambat perkembangan individu, mengakibatkan penurunan produktivitas, dan meningkatkan ketimpangan sosial. Meskipun tingkat pendidikan telah meningkat di Nusa Tenggara Timur, terdapat kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan para lulusan dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan data pengangguran terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tabel ini memuat informasi mengenai jumlah pengangguran terdidik menurut tingkat Pendidikan yaitu SD, SLTP, dan SLTA ke atas dari tahun 2018 hingga 2022 yang belum mendapatkan pekerjaan.

Tabel 1.1

Data Pengangguran Terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa) dari Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Pengangguran Terdidik di Provinsi NTT Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa)			
		SD	SLTP	SLTA ke Atas	JUMLAH
1.	2018	11.803	5.452	57.493	74.748
2.	2019	11.885	7.050	64.095	83.030
3.	2020	27.098	10.631	84.155	121.884
4.	2021	27.257	16.074	66.597	109.928
5.	2022	24.433	12.082	70.613	107.128

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi pada kalangan lulusan SD terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah jiwa pengangguran sebanyak 27.257 (jiwa), sedangkan tingkat pengangguran paling rendah terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah jiwa pengangguran sebanyak 11.803 (jiwa). Pada kalangan lulusan SLTP tingkat pengangguran paling tinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah jiwa pengangguran 16.074 (jiwa), sedangkan untuk tingkat pengangguran paling rendah terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah jiwa pengangguran 5.452 (jiwa). Untuk SLTA ke atas tingkat pengangguran paling tinggi sebanyak 84.155 (jiwa) yang terjadi pada tahun 2020, sedangkan tingkat pengangguran paling rendah terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah jiwa pengangguran sebanyak 57.493 (jiwa). Dengan demikian,

dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran tertinggi terjadi di kalangan lulusan SLTA ke atas dengan jumlah 84.155 (jiwa) yaitu pada tahun 2020, sedangkan tingkat pengangguran paling rendah terjadi di kalangan lulusan SLTP dengan jumlah jiwa pengangguran sebanyak 5.452 (jiwa) yaitu pada tahun 2018.

Berikut adalah tabel data pengangguran terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menurut Tenaga kerja dari tahun 2018 hingga 2022. Data ini mencakup tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang diukur sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.2
Data Pengangguran Terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Tenaga Kerja (jiwa) dari Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Pengangguran Terdidik di Provinsi NTT Menurut Tenaga Kerja (Jiwa)
1.	2018	1.844.582
2.	2019	1.831.685
3.	2020	2.085.038
4.	2021	2.148.313
5.	2022	2.229.908

Sumber: Olahan Data Penulis Berdasarkan Data BPS Provinsi NTT

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah pengangguran tertinggi selama lima (5) tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 yaitu dengan jumlah 2.229.908 (jiwa),

sedangkan jumlah pengangguran paling rendah terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah pengangguran sebanyak 1.831.685 (jiwa).

Analisis variabel makro yang mencakup faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pendidikan dapat memberikan wawasan mendalam tentang penyebab dan dampak dari tingginya tingkat pengangguran terdidik di Provinsi NTT. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor ini, upaya-upaya kebijakan dapat dirancang dan diimplementasikan secara lebih efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran terdidik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penelitian yang menyelidiki hubungan antara variabel makro ekonomi dan tingkat pengangguran terdidik di Provinsi NTT memiliki relevansi yang besar untuk menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika ekonomi daerah ini serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah pengangguran terdidik secara efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS VARIABEL MAKRO PENGANGGURAN TERDIDIK DI PROVINSI NTT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengangguran terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)?
2. Apakah upah minimum regional, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh secara parsial terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah upah minimum regional, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh secara simultan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pengangguran terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
2. Untuk mengetahui upah minimum regional, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh secara parsial terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
3. Untuk mengetahui upah minimum regional, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh secara simultan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman baru dan mendalam tentang **ANALISIS VARIABEL MAKRO PENGANGGURAN TERDIDIK DI PROVINSI NTT** yang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan salah satu referensi bagi para peneliti yang akan datang mengenai pengangguran terdidik di Provinsi NTT.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya dalam mengambil kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi jumlah pengangguran terdidik. Pemerintah dapat melakukan upaya dengan cara menambah jumlah lapangan kerja dan meningkatkan sumber daya manusia maka akan menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran terdidik di Provinsi NTT.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat agar lebih memahami dan memperluas wawasan mengenai permasalahan pengangguran terdidik di Provinsi NTT.